



UNIVERSITAS

IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG KESEJAHTERAAN AWAK KAPAL SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK BAGI PEKERJA SESUAI DENGAN PERATURAN BIDANG KETENAGAKERJAAN KHUSUSNYA TENAGA KERJA SEKTOR TRANSPORTASI LAUT

IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG KESEJAHTERAAN AWAK KAPAL SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK BAGI PEKERJA SESUAI DENGAN PERATURAN BIDANG KETENAGAKERJAAN KHUSUSNYA TENAGA KERJA SEKTOR TRANSPORTASI LAUT

AMALIA KATRIS HARDINI, Pitaya, S.H., M.Hum.

Universitas Gajah Mada, 2016. Nuntuh dan <http://eui.repository.ugm.ac.id/>

INTISARI

Oleh

Amalia Katris Hardini¹ dan Pitaya, SH, MHum²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak tenaga kerja sektor transportasi laut dalam rangka menjamin pemenuhan kesejahteraan awak kapal dan mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak untuk menjamin kesejahteraan awak kapal. Ketersediaan Awak kapal merupakan salah satu faktor yang harus dipenuhi dalam persyaratan kelaiklautan kapal. Tersedianya awak kapal disini baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Awak kapal yang berkualitas tentu akan sangat mempengaruhi kinerja operasional sebuah kapal ketika sedang berlayar. Kesejahteraan awak kapal meliputi banyak aspek mulai dari kondisi tempat kerja, hubungan diantara para awak kapal, jaminan kesehatan, kompensasi dan promosi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yuridis karena karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder), dan pendekatan empiris, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat aspek yang digunakan dalam penelitian ini, yang belum dijalankan perusahaan berdasarkan hasil studi belum dapat diterima dengan baik oleh awak kapal. Diketahui bahwa untuk aspek besaran gaji belum cukup memberikan kontribusi bagi kesejahteraan kerja para awak kapal dalam melakukan pekerjaan. Hal ini disebabkan karena gaji yang diberikan kepada awak kapal masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini juga ditemukan beberapa kendala dalam pemenuhan kesejahteraan awak kapal tersebut yaitu posisi tawar yang tidak seimbang antara awak kapal dengan pengusaha, kurangnya kompetensi awak kapal itu sendiri dan kurangnya pengawasan dari pemerintah sebagai regulator.

Kata Kunci : Awak Kapal, Kesejahteraan Awak Kapal, Hak, Kewajiban, Pengusaha, Pengawasan.

¹Kementerian Perhubungan

²Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta

**IMPLEMENTATION OF PROVISIONS OF WELFARE AS A FORM OF SHIP CREW BILL OF
RIGHTS FOR WORKERS IN ACCORDANCE WITH LABOR REGULATION IN PARTICULAR
SEA TRANSPORTATION SECTOR**

ABSTRACT

By

Amalia Katris Hardini¹ and Pitaya, SH, MHum²

This study aims to determine and analyze the rights of labor marine transport sector in order to ensure compliance with the welfare of the crew and knowing and analyze the obstacles to the fulfillment of rights to ensure the welfare of the crew. Availability The crew is one of the factors that must be met in the terms of seaworthiness. The availability of the crew here in terms of both quality and quantity. Qualified crew will greatly affect the operational performance of a ship while sailing. Welfare crew covering many aspects ranging from workplace conditions, the relationships among the crew members, health care, compensation and promotion.

This research is use the juridical empirical method, a juridical due because in discussing the problem of research using legal materials (both the written law and the unwritten law or both primary legal materials and secondary law), and the empirical approach, because in this study used primary data obtained from the field. The analyzes methodology used in this research is the qualitative analyzes.

The results showed that, there is one of the aspects used in this study, is not done yet by the company according to the research and not received well by the crew. It also known that the aspect is the salary not sufficiently contributed to the welfare of the working crew in doing work. Its because the salary of the crew is giving under the government regulation. According to the research also known that there are many obstacles to the fulfillment of rights to ensure the welfare of the crew, such as the bargaining position of the crew it self, the lack of competition of the crew and lack of supervision by the government sa a regulator.

Keywords : the crew, the Welfare of the crew, Rights, Liability, Employers, Supervision

¹ Ministry of Transportation

² Faculty of Law, Gajah Mada University Yogyakarta